

BERAU SIAGA DARURAT KARHUTLA

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 2



Di Bawah Bayang-Bayang El Nino

Perjuangan Berau Padamkan Ancaman Karhutla

GELOMBANG panas ekstrem akibat fenomena El Nino sedang memanggang Kabupaten Berau. Minimnya curah hujan dalam durasi panjang, tingginya suhu harian, serta atmosfer yang kian mengering kini mengubah ribuan hektare vegetasi dan hutan di Bumi Batiakkal menjadi “bahan bakar” yang sangat rawan tersulut api.

Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi krisis nyata yang mengepung pemukiman hingga kawasan hutan lindung.

Data pemantauan BMKG Berau mencatat lonjakan drastis sebanyak 923 titik panas yang tersebar di Berau sepanjang periode pengamatan ter-

baru. Dari belasan kecamatan, Kecamatan Segah dan Pulau Derawan mendadak menjadi dua wilayah dengan konsentrasi titik panas tertinggi secara berturut-turut.

Di Kecamatan Segah, tren hotspot melonjak drastis dari 22 titik pada 3 Agustus menjadi 65 titik pada 8 Agustus. Sementara di Pulau Derawan, titik panas sempat memuncak hingga 55 titik pada 2 Agustus dan 40 titik pada 9 Agustus. Adapun Kecamatan Kelay turut mencatatkan 31 titik panas pada 5 Agustus.

Kepala BMKG Berau, Ade Heryadi, menjelaskan, maraknya titik panas dipicu oleh kombinasi kondisi atmosfer yang sangat kering akibat minimnya hujan, suhu udara

harian yang terik, serta tiupan angin kencang.

“Pergerakan angin juga berpotensi meningkatkan kemunculan titik hotspot di wilayah Berau,” ungkap Ade kepada Berauterkini, Selasa (11/8/2026).

Mengingat potensi hujan masih sangat rendah serta lapisan tanah yang kian gersang, BMKG meminta seluruh elemen masyarakat untuk memperketat pengawasan di area rawan.

Masyarakat juga diminta tidak tinggal diam dan segera melapor ke pihak berwenang jika menemukan indikasi titik api, serta aktif memantau pembaruan cuaca resmi.

Eskalasi ancaman ini kian dipertegas data BMKG Kali-

mantan Timur. Sepanjang Kamis (13/8/2026) dari pukul 01.00 hingga 24.00 WITA, terdeteksi 221 titik api dalam kurun waktu 24 jam yang tersebar di 11 dari 13 kecamatan di Berau.

Sebaran titik api menempatkan Kecamatan Pulau Derawan sebagai wilayah terbanyak dengan 68 titik, disusul Kecamatan Segah 64 titik, Sambaliung 27 titik, Gunung Tabur 25 titik, Talisayan 11 titik, Kelay 9 titik, serta Biatan 6 titik. Adapun Tabalar dan Teluk Bayur masing-masing terdeteksi 3 titik, serta Batu Putih dan Bidukbiduk masing-masing 2 titik. Hanya Kecamatan Tanjung Redeb dan Maratua yang terpantau nihil titik api.

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 3

BMKG mengingatkan fluktuasi titik panas masih sangat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Data pembaruan hotspot terus diperbarui secara berkala setiap harinya pukul 18.00 WITA.

MINIMNYA PERSONEL DAN ANGGARAN OPERASIONAL

Ancaman Karhutla yang mengganaskan tidak hanya membumihanguskan lahan, tetapi juga memakan korban di barisan penanggulangan bencana. Perjuangan memadamkan api di poros Kasai-Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Senin (10/8/2026), menyisakan kisah pilu yang membuka mata publik.

Seorang anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau tumbang hingga pingsan saat berjibaku seorang diri menahan amukan si jago merah.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Berau, Nofian Hidayat, membenarkan insiden memprihatinkan tersebut.

"Benar, itu personel kami dari saat kejadian, dia kabarnya seorang diri. Karena kelelahan, akhirnya pingsan saat bertugas. Kemudian dibantu warga sekitar dan dilarikan ke puskesmas terdekat," ujar Nofian.

Menurut Nofian, peristiwa

pingsannya petugas tersebut merupakan cerminan dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang dihadapi Disdamkarmat Berau. Di setiap posko kecamatan, hanya tersedia sekitar tiga personel yang harus membagi tugas dalam sistem pergantian (shift). Kondisi ini membuat penanganan Karhutla di wilayah pelosok menjadi sangat berat, terlebih saat kebakaran terjadi bersamaan di beberapa titik.

Nofian mengakui kewenangan utama penanganan Karhutla ada pada BPBD Berau, namun Disdamkarmat sebagai eksekutor pemadaman tidak bisa berdiam diri. Tak hanya krisis SDM, Disdamkarmat juga dihantam kendala anggaran operasional. Nofian mengungkapkan instansinya tidak memiliki alokasi anggaran BBM khusus untuk kegiatan penanganan Karhutla.

Padahal, Disdamkarmat merupakan OPD teknis di garis terdepan. Anggaran Karhutla sebenarnya terdapat dalam Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBHDR), namun Disdamkarmat tidak mendapatkan kucuran alokasi tersebut.

Ia menyayangkan ketimpangan antara beban tugas dan alokasi dukungan di lapangan. "Ini cukup kita sayangkan. Kita sebagai OPD ek-

sekutor ketika ada bencana, tetapi masih memiliki banyak keterbatasan," imbuhnya.

Petugas yang sempat tumbang tersebut kini dilaporkan telah pulih dan kembali bersiap di posko. Kepala Disdamkarmat Berau, Rakhmadi Pasarikan, mengonfirmasi kondisi anak buahnya.

"Alhamdulillah, sudah sehat sejak kemarin sore dan sudah standby di posko kembali," kata Rakhmadi, Selasa (11/8/2026).

Meski demikian, Rakhmadi mengakui krisis armada dan keterbatasan personel masih mengikat tangan Disdamkarmat dalam menjangkau wilayah kecamatan rawan.

"Kami memang kekurangan personel secara keseluruhan, sehingga pergeseran personel masih belum memungkinkan. Kami berharap ada bantuan dari stakeholder," ujarnya.

SIAGA DARURAT KARHUTLA

Merespons eskalasi kebakaran yang meluas cepat, Pemerintah Kabupaten Berau mengambil langkah resmi menetapkan Status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan.

Kepala Pelaksana BPBD Berau, Masyhadi Muhdi, menyampaikan, penetapan status ini bertujuan untuk



MASYHADI MUHDI
Kepala Pelaksana
BPBD Berau

Dari yang terdata kurang lebih 42 hektare lahan yang terbakar. Tapi ada beberapa daerah yang tidak terjangkau armada kami dan luasnya belum bisa ditaksir"

memperkuat koordinasi dan komando pemadaman tim gabungan.

Pemkab juga menggelar Rapat Koordinasi Siaga Darurat di Kantor BPBD Berau pada Kamis (13/8/2026).

"Di rapat itu kita memperkuat sinergi serta melakukan pencegahan. Kami terus berupaya melakukan penanganan cepat agar kebakaran tidak meluas," kata Masyhadi, Jumat (14/8/2026).

BACA SELINGKAPNYA DI HALAMAN 4



Masyhadi menjelaskan fenomena El Nino memicu cuaca panas ekstrem, namun ia memastikan belum sampai memicu krisis air bersih maupun gagal panen pertanian.

Saat ini, fokus BPBD bertumpu pada pemadaman Karhutla. Masyhadi menduga maraknya kebakaran dominan dipicu oleh pembukaan lahan dengan cara membakar serta kelalaian seperti puntung rokok.

Mengenai ancaman kabut asap pekat seperti krisis 2016 dan 2019, Masyhadi berharap skenario buruk itu tidak terjadi. "Belum bisa berandai-andai. Mudah-mudahan itu tidak terjadi," ucapnya.

Berdasarkan data BPBD Berau, sedikitnya 42 hektare lahan terdata telah hangus terbakar, dan angka ini masih berpotensi bertambah di titik pelosok yang sulit ditembus.

"Dari yang terdata kurang lebih 42 hektare lahan yang terbakar. Tapi ada beberapa daerah yang tidak terjangkau



armada kami dan luasnya belum bisa ditaksir," ujarnya.

Bupati Berau, Sri Juniorsih Mas, meminta secara seluruh perusahaan swasta di sekitar wilayah rawan untuk memaksimalkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR).

Bupati menegaskan penanganan Karhutla butuh gotong royong lintas sektor. "Lebih dikuatkan koordinasi antara OPD yang terkait supaya bisa bekerja bersama dalam memastikan seluruh pelayanan terkait musibah-musibah tersebut dapat dilaksanakan bersama-sama," katanya.

"Sekarang kita sudah berada dalam kondisi ekstrem. Panas yang cukup tinggi, namanya El Nino. Berau ini memang sangat panas dengan derajat yang cukup tinggi," imbuhnya.

SINERGI DI LAPANGAN

Di tengah keterbatasan, kolaborasi positif tampak di kawasan Labanan, Kecamatan Teluk Bayur. Perusda PT Hutan Sanggam Berau (HSB) turun menyalurkan bantuan logistik dan pasokan BBM kepada Posko Damkar Labanan, Rabu (12/8/2026).

Direktur Operasional PT HSB, YP Kurniawan, menjelaskan bantuan tersebut bentuk komitmen menjaga kawasan hutan.

"Kami juga mendukung dengan mengerahkan empat

SDM serta satu unit mobil yang dilengkapi peralatan pemadam kebakaran. Kegiatan ini bagian dari komitmen dan kepedulian perusahaan terhadap penanggulangan dan pencegahan karhutla. Sekaligus menjaga kawasan dan ekosistem hutan kita," ujarnya.

Danru Posko Damkar Labanan, Dwi Susilo, menyambut haru bantuan tersebut karena selama ini ia mengawal posko seorang diri.

"Petugas posko ini hanya saya sendiri. Tapi ketika ada kejadian kebakaran saya dibantu relawan yang punya waktu kosong. Tapi kalau sedang ada kegiatan lain, tentu tidak bisa membantu," jelas Dwi.

Oleh karena itu, Dwi mengapresiasi bantuan satu drum BBM, kendaraan, dan personel dari PT HSB. "Kalau bisa ada bantuan dari perusahaan-perusahaan terdekat untuk wilayahnya masing-masing, tentu kerja sama akan lebih mudah," harapnya.

Sementara itu, Polres Berau mengambil langkah siaga penuh dengan menyiagakan sekitar 500 personel untuk membantu penanganan Karhutla.

Wakapolres Berau, Kompol Noor Dhianto, mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan.

"Fenomena El Nino membuat kondisi vegetasi menjadi sangat kering dan rentan

terbakar. Dan ini yang terjadi sekarang. Saat ini kondisi Berau sedang dalam ancaman Karhutla di mana-mana. Kami minta petani jangan membakar lahan untuk bertani atau berkebun," jelas Noor Dhianto, Kamis (13/8/2026).

AKTIVITAS PENERBANGAN MASIH AMAN

Meski titik api mengepulkan asap di 11 kecamatan, aktivitas penerbangan di Bandara Kalimantan dipastikan masih berjalan normal dan aman.

Kepala Bandara Kalimantan, Patah Atabri, mengonfirmasi jarak pandang (visibility) masih di atas batas aman operasional.

"Untuk jarak pandang atau visibility minimal untuk pelayanan navigasi penerbangan di Bandara Kalimantan untuk take off 1.600 meter dan landing 3.500 meter," ungkap Patah kepada Berauterkini, Jumat (14/8/2026).

Patah menambahkan pihak bandara terus berkoordinasi intensif dengan BMKG serta menyiagakan armada damkar internal.

Kepala BMKG Berau, Ade Heryadi, menambahkan data teknis landasan pacu.

"Dari sensor visibility yang terpasang di runway Bandara Kalimantan, jarak pandang teramati pagi hari jam 07.00–09.00 WITA dari 5–6 km," pungkas Ade. (ADRIKNI SHOLIKHATI /DINI DIVA APRILIA/ HENDRA IRAWAN)



KOMPOL NOOR DHianto
Wakapolres Berau



Fenomena
El Nino membuat kondisi vegetasi menjadi sangat kering dan rentan terbakar. Dan ini yang terjadi sekarang. Saat ini kondisi Berau sedang dalam ancaman Karhutla di mana-mana. Kami minta petani jangan membakar lahan untuk bertani atau berkebun"

Mengurai Benang Kusut BBM Berau

PEMANDANGAN antrean panjang kendaraan roda empat yang mengular hingga memakan bahu jalan kembali menjadi sorotan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Berau.

Para pengendara terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam di dalam kabin kendaraan demi mendapatkan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Selain menyita waktu, penumpukan kendaraan ini juga kerap memicu kemacetan lalu lintas.

Kondisi tersebut berulang kali dikeluhkan pengguna jalan umum. Kepadatan kendaraan kerap menimbulkan kemacetan krusial, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore hari.

Kendati demikian, bagi para pengantre BBM, proses menunggu lama yang meleihkan ini seolah-olah telah berubah menjadi bagian dari rutinitas harian yang tidak terhindarkan.

Salah seorang pengendara asal Kecamatan

Segah, Sarita, mengaku harus merutinkan diri mengantre seminggu sekali di SPBU Bujangga untuk mengisi Paltelite hingga Rp400 ribu. Demi memangkas durasi menunggu, ia kerap berpindah-pindah mencari SPBU yang antreannya relatif lebih pendek, seperti di Jalan Rawa Indah (Kilometer 5).

"Kadang di sini, kadang di Kilo 5, tiap minggu saya mengantre. Balik lagi hari minggu besok," ujar Sarita saat ditemui Berauterkini, Sabtu (8/8/2026).

Meski memakan waktu lama, Sarita mengaku pasrah dan terbiasa dengan kepungan antrean tersebut. Menurutnya, tidak ada pilihan lain bagi warga biasa jika ingin mendapatkan BBM bersubsidi.

"Akhirnya jadi biasa, kalau enggak gini kita kapan dapatnya," cetusnya pasrah.

Fenomena antrean yang meluber ini juga dibenarkan warga sekitar. Seorang pedagang menuturkan, puncak antrean biasanya terjadi saat pengendara menantikan kedatangan armada truk tangki hingga proses pembongkaran BBM ke tangki pendam selesai.

"Nunggu solar, nunggu tangki masuk, belum bong-



karnya lagi. Bisa nunggu lama tergantung mana yang perlu itu kan," tuturnya.

MANAJEMEN SPBU KLAIM JALANKAN SOP KETAT

Menjawab derasnya tuduhan publik terkait kelonggaran pengawasan yang dituding menjadi karpet merah bagi pengetap, pengelola SPBU Bujangga memberikan klarifikasi. Manajemen mengklaim telah menjalankan seluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) penyaluran sesuai arahan PT Pertamina Patra Niaga dan Pemkab Berau.

Pengawas SPBU Bujangga, Agus, menjelaskan pihaknya telah memperketat pengawasan di area pompa guna mengantisipasi pengisian berulang.

U n -

tuk roda empat, petugas diwajibkan menyelaraskan kode QR (barcode) dengan nomor polisi dan STNK. Sementara untuk roda dua, dilakukan pencatatan nopol secara manual.

"Pengawasan tersebut seperti kesesuaian barcode kendaraan, pelat kendaraan, jenis kendaraan serta melihat kecocokan semuanya dengan STNK kendaraan tersebut agar semua sesuai dan tidak terjadi pengisian berulang," ujar Agus kepada Berauterkini, Senin (10/8/2026).

BACA SELENGKAPNYA DI HALAMAN 6





Pemeriksaan STNK fisik dinilai krusial untuk mencegah penggunaan nopol palsu. Mengenai kemacetan parah di lokasi, Agus menuturkan hal itu dipicu lonjakan konsumsi yang berpadu dengan letak SPBU di celah jalan sempit dekat persimpangan Jembatan Bujangga.

“Kami telah berupaya semaksimal mungkin guna mengatur dan memecah antrean agar selalu tertib dengan menambah personel marshall SPBU guna mengatur dan mengurai kemacetan,” ungkapnya.

Agus menegaskan manajemen tidak mentoleransi tindakan ‘main mata’ antara operator dan pengetap. Sanksi pemecatan dipastikan menanti petugas yang melanggar.

“Menerapkan SOP barcode dan mencatat nomor kendaraan untuk sementara waktu menjadi solusi menekan pengantre,” tegasnya.

PERTAMINA BINA 4 SPBU DI BERAU

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan verifikasi di SPBU merupakan hal mutlak. Penggunaan kode QR Subsidi Tepat wajib dicocokkan secara fisik dengan kendaraan yang datang.

Sales Branch Manager (SBM) III Fuel Kalimantan Timur dan Utara PT Pertamina Patra Niaga, Hermawan Bagus, menegaskan pengawasan dilakukan untuk mencegah penyimpangan.

“Jadi, sebelum melakukan pengisian, petugas harus

melakukan verifikasi terlebih dahulu. Data pada QR Code harus sesuai dengan kondisi fisik kendaraan,” kata Hermawan.

Dari hasil evaluasi di lapangan, Pertamina bahkan telah mengambil langkah tegas terhadap SPBU yang terbukti lalai menjalankan prosedur verifikasi tersebut.

“Di Kabupaten Berau, terdapat empat SPBU yang telah menerima surat pembinaan sebagai tindak lanjut pengawasan,” beber Hermawan.

Ia mengimbau masyarakat menggunakan kode QR milik sendiri. “QR Code digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kami mengajak masyarakat bersama-sama menjaga agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

POLRES BERAU GELAR RAKOR PENGAWASAN BBM

Maraknya antrean panjang dan indikasi penyaluran tak tepat sasaran mendapat perhatian serius jajaran kepolisian. Satreskrim Polres Berau menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pada Senin (10/8/2026) bersama Pertamina, Diskoperindag, dan pengelola SPBU se-Berau.

Kasat Reskrim Polres Berau, AKP Muhammad Fajri, menegaskan pengawasan harus diperketat dari hilir ke hulu karena polemik BBM berpotensi memicu gangguan kamtibmas.

“Rakor ini kami gelar untuk

menganalisis berbagai persoalan mendasar di SPBU. Mulai dari keterbatasan kuota, pengawasan distribusi yang belum optimal, hingga indikasi penyalahgunaan QR Code dan identitas kendaraan,” ujar Fajri.

Fajri berharap koordinasi ini membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tertib.

“Harapannya dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tertib, tepat sasaran, sekaligus mengurangi antrean panjang yang selama ini jadi keluhan,” imbuhnya.

PUBLIK SOROTI PENGETAP DAN DESAK HET ECERAN

Di sisi lain, keluhan masyarakat membanjiri kolom komentar Berauterkini. Warga mendesak Pemkab Berau menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat pengecer/pertamina maksimal Rp12.000 per liter untuk menekan margin keuntungan pengecap.

“Kalau pemerintah menetapkan harga eceran Rp12 ribu, kalau ada yang menjual di atasnya sidak saja. BBM itu disubsidi pemerintah, jangan sampai yang menikmati subsidi justru pengecer,” tulis salah satu warga.

Warga lainnya menilai wacana penambahan kuota akan sia-sia jika praktik penimbunan tidak ditindak tegas.

“Percuma nambah kuota, pasti nambah juga kuota penimbun. Tinggal beli profil tank besar, persoalan akan terus



AKP MUHAMMAD FAJRI
Kasat Reskrim Polres Berau

Rakor ini kami gelar untuk menganalisis berbagai persoalan mendasar di SPBU. Mulai dari keterbatasan kuota, pengawasan distribusi yang belum optimal, hingga indikasi penyalahgunaan QR Code dan identitas kendaraan”

terjadi,” cetus warganet.

Masyarakat juga meminta Pemkab Berau melibatkan warga bawah dalam merumuskan solusi.

“Jangan membahas kebutuhan masyarakat hanya di level pejabat. Minimal perwakilan RT dan warga dari beberapa kecamatan dilibatkan agar solusi yang diambil tidak lepas sasaran,” tegas seorang warga. **(ADRIKNI SHOLIKHATI/DINI DIVA APRILIA/ HENDRA IRAWAN)**

Tamsil Macet Guru Honorer Menjerit

Disdik Berau Bayar Rapel 5 Bulan

NASIB prihatin melanda para guru honorer yang bertugas di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) Kabupaten Berau. Di tengah tingginya harga kebutuhan pokok dan lonjakan biaya transportasi imbas kenaikan BBM, Tambahan Penghasilan (Tamsil) yang menjadi penopang hidup mereka dilaporkan macet sejak Juni 2026.

Salah seorang guru honorer di wilayah pedalaman yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, gaji pokok sekitar Rp1 juta per bulan tidak lagi mencukupi untuk bertahan hidup. Besaran tamsil senilai Rp1,25 juta per bulan yang diandalkan pun kerap terlambat dibayarkan hingga berbulan-bulan.

"BBM naik, apa-apa semua mahal, sedangkan kami yang ngajar di pedalaman 3T ini bukan asli dari wilayah tersebut. Terus kayak apa kami mau makan, enggak ada sama sekali kami pendapatan," keluhnya kepada Berauterkini, Selasa (11/8/2026).

Tingginya harga logistik di daerah pelosok kian mencekik. Untuk membeli sekaleng sarden saja harganya bisa mencapai Rp40 ribu, semen-

tara mi instan dibanderol Rp5 ribu per bungkus.

Jika harus berbelanja ke kawasan kota Tanjung Redeb, ongkos transportasi yang dikeluarkan justru membengkak.

Ia mempertanyakan kejelasan konsep Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang sempat digagas Pemkab Berau sejak Januari lalu. Para tenaga pendidik berharap skema tersebut dapat segera diterapkan agar kesejahteraan guru di pedalaman meningkat setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) Berau.

Ia mengingatkan, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius dari dinas terkait, dikhawatirkan akan timbul gelombang pengunduran diri tenaga pendidik di wilayah 3T. Hal tersebut tentu berdampak buruk bagi akses pendidikan anak-anak di pedalaman.

"Tamsil kadang lewat dua bulan, kadang sebulan itu pun telat. Ini dari Juni enggak keluar. Tamsil itu satu bulan dapat cuma Rp1,250 juta, enggak cukup sama sekali," ungkap-

nya. Saat dikonfirmasi, Rabu (12/8/2026), Kepala Disdik Berau, Mardiatul Idalisah, menjelaskan, keterlambatan

pembayaran tersebut terjadi lantaran alokasi anggaran tamsil sejauh ini memang baru dicairkan lima bulan.

Untuk menutupi sisa bulan yang belum terbayarkan, pihaknya tengah mengusulkan alokasi tamsil tambahan melalui skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Saat ini, Disdik Berau sedang memproses tahap verifikasi dan validasi (verval) data para tenaga pendidik penerima.

"Sedang diusulkan pada anggaran perubahan. Kami juga sedang melakukan verval," tambahnya.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Berau, Mustaring, menambahkan, tamsil guru yang terhenti sejak Juni akan dicairkan kembali pada Oktober mendatang. Skema pembayarannya akan dirapel sekaligus untuk lima bulan, yakni dari Juni hingga Oktober.

Keterlambatan pencairan tamsil, termasuk bagi guru honorer di kawasan 3T terjadi akibat adanya penyesuaian dan efisiensi anggaran di awal tahun. Sehingga, alokasi yang disetujui BPKAD saat itu han-



MARDIATUL IDALISAH
Kepala Disdik Berau

Sedang diusulkan pada anggaran perubahan. Kami juga sedang melakukan verval"

ya cukup untuk lima bulan pertama 2026.

Mustaring menambahkan, Kepala Disdik Berau telah menginstruksikan bagian Penyusunan Program untuk mengawal pengusulan sisa anggaran tersebut.

Setelah tunggakan lima bulan dibayarkan secara rapel pada Oktober, pencairan tamsil untuk dua bulan terakhir, yakni November dan Desember, dipastikan kembali normal dan dibayarkan secara rutin setiap bulannya. (ADRIKNI SHOLIKHATI)

Polres Berau Amankan Bumi Batiwakkal

Bentuk Tim URC-Rangkul Perguruan Silat

POLRES Berau memperkuat barisan menghadapi kejahatan jalanan. Mulai dari begal, pencurian dengan kekerasan, curanmor, premanisme hingga aksi geng motor, kini menjadi sasaran Tim Unit Reaksi Cepat (URC) yang baru diresmikan.

Tim khusus ini disiapkan untuk bergerak cepat setiap kali masyarakat membutuhkan bantuan kepolisian, terutama ketika terjadi gangguan keamanan dan tindak kriminal, yang membutuhkan penanganan segera.

Launching dilakukan Waka-polres Berau, Kopol Noor Dhianto, setelah Apel Sabuk Kamtibmas, Kamis (13/8/2026), sebagai tindak lanjut atas arahan Kapolda Kalimantan Timur untuk memperkuat penanganan kejahatan jalanan.

"Pada hari ini, kami dari Polres Berau menindaklanjuti atensi Bapak Kapolda Kaltim untuk menanggulangi tindak pidana. Baik begal, curas, premanisme, curanmor, maupun aksi geng motor di wilayah Kabupaten Berau," ujarnya.

URC diisi personel pilihan yang didukung Satreskrim serta jajaran polsek. Tim tersebut menjadi salah satu ujung tombak kepolisian dalam merespons laporan masyarakat, permintaan bantuan darurat, sekaligus melakukan penindakan terhadap gangguan kamtibmas.

"Harapannya, URC ini dapat mengurangi potensi tindak kejahatan di tengah masyarakat Berau," jelasnya.

Meski menyiapkan tim khusus, Noor Dhianto menegaskan, upaya pencegahan tetap menjadi prioritas. Patroli rutin akan terus ditingkatkan, termasuk memperluas kehadiran personel berseragam di tengah masyarakat.

Polres Berau juga mengirimkan pesan keras kepada para pelaku kejahatan jalanan. Pihaknya memastikan, tidak akan memberikan ruang bagi siapapun yang mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Kecepatan respons URC nantinya terhubung dengan layanan darurat Call Center Polri 110. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada tim untuk segera ditindaklanjuti di lokasi.

"Setiap laporan yang masuk di 110, tim URC akan segera bergerak ke lokasi untuk memberikan pertolongan, penanganan awal, hingga penindakan jika ditemukan unsur pidana," tegasnya.

Sebelumnya, dalam upaya menjaga kamtibmas, Polsek Tanjung Redeb menyambangi sejumlah perguruan pencak silat melalui Program Sabuk Kamtibmas (Sahabat untuk Kamtibmas).

Kapolsek Tanjung Redeb, AKP Amin Maulani, bersama personel Unit Intelkam men-



yambangi Sekretariat Perguruan Silat Cempaka Putih Cabang Berau di Jalan Durian 3, Kelurahan Gunung Panjang, dan disambut sang ketua, Edi Suparlan, bersama jajaran pengurus.

Silaturahmi kemudian dilanjutkan ke Sekretariat Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW) Tunas Muda Cabang Berau.

Amin mengatakan, Program Sabuk Kamtibmas menjadi wadah kemitraan antara Polri dan masyarakat untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan di lingkungan masyarakat.

Ia mengajak para pengurus perguruan pencak silat untuk mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan apabila terjadi persoalan, baik yang melibatkan anggota maupun antarperguruan.

"Alhamdulillah sejauh ini semua aman dan guyub rukun. Semua perguruan sama-sama menjaga kamtibmas

tetap aman di Berau, khususnya di Tanjung Redeb," katanya, Minggu (9/8/2026).

Selain menjaga hubungan antar perguruan, kepolisian juga menekankan pentingnya pembinaan terhadap para anggota agar tidak mudah terpengaruh informasi bohong atau ajakan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran hukum.

Perguruan pencak silat juga diharapkan tidak hanya menjadi wadah pembinaan olahraga dan beladiri semata. Tetapi, turut berperan sebagai mitra strategis kepolisian dalam mendeteksi potensi gangguan keamanan di lingkungan masyarakat.

Dia juga meminta pengurus perguruan di Tanjung Redeb menyampaikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya potensi gangguan kamtibmas, baik itu penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, balap liar, tawuran, maupun tindak pidana lainnya. (HENDRA IRAWAN)



Gelombang PHK Terus Ancam Berau Sri Juniarsih Kebut Peluang Investasi Baru

GELOMBANG Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diprediksi menerjang Kabupaten Berau pada Agustus 2026. Salah satu perusahaan pertambangan dilaporkan akan menutup operasionalnya secara total setelah memutus hubungan kerja karyawan secara bertahap.

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau mencatat, sepanjang Desember 2025 hingga Mei 2026 saja, angka PHK di Berau sudah menembus 1.587 pekerja. Sektor pertambangan masih menjadi penyumbang dominan, disusul sektor perkebunan yang mayoritas dipicu masalah personal pekerja.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Berau, Soni Perianda, mengonfirmasi bahwa penutupan penuh satu perusahaan tambang bulan ini akan berdampak pada angka pengangguran daerah.

Faktor efisiensi hingga habisnya masa kontrak operasional menjadi alasan utama.

"Memang di Agustus ini, ada satu perusahaan yang statusnya akan tutup, dan karyawannya di-PHK secara keseluruhan. Mereka sebelumnya melakukan PHK secara bertahap," ungkap Soni.

Meski demikian, Soni memastikan perusahaan terkait dinilai kooperatif dan mematuhi aturan pembayaran pesangon. Sebagai langkah mitigasi, Disnakertrans telah menyiapkan program pelatihan kerja serta pendaftaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja terdampak.

Harapan penyerapan tenaga kerja juga terbuka seiring hadirnya perusahaan tambang baru di kawasan Merancang yang memboyong tujuh sub-contractor.

"Ada perusahaan tutup, tetapi peluang kerja lainnya juga ada.

Misal nanti ada pelatihan-pelatihan, kami coba ikut sertakan sesuai syarat ketentuan," tegas Soni.

Menanggapi potensi lesunya perputaran ekonomi daerah akibat gelombang PHK ini, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Berau tidak tinggal diam. Pemkab terus mendorong masuknya investasi dan operasional industri baru, salah satunya rencana pengaktifan kembali kawasan eks Kertas Nusantara.

"Pastinya seperti itu (memengaruhi ekonomi). Tapi kita akan terus memikirkan supaya ekonomi terus berjalan," ujar Sri Juniarsih kepada Berauterkini.

Ia menambahkan, koordinasi antar-OPD terus diperketat untuk memantau dampak PHK sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru demi menjaga daya beli masyarakat Bumi Batiwakkal.

"Mungkin ada solusi-solusi yang lain, seperti misalnya



SRI JUNIARSIH MAS
Bupati Berau

Pastinya seperti itu (memengaruhi ekonomi). Tapi kita akan terus memikirkan supaya ekonomi terus berjalan"

ada perusahaan yang akan buka dengan Kertas Nusantara. Insya Allah, kita tetap pikirkan melalui dinas terkait," pungkasnya. **(ADRIKNI SHOLIKHATI/DINI DIVA APRILIA)**



Adat Bahari Tulak Bala Buang Naas

Warisan Leluhur Talisayan yang Terus Dijaga

Di tengah derasnya perkembangan zaman, masyarakat Talisayan, Kabupaten Berau, masih mempertahankan tradisi bahari yang diwariskan secara turun-temurun.

Adat Bahari Tulak Bala Buang Naas kembali digelar di Kecamatan Talisayan sebagai wujud menjaga warisan budaya sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat.

Mengusung tema “Merawat Silaturahmi, Melestarikan Adat Bahari untuk Talisayan Berkah dan Harmoni”, tradisi tersebut menjadi pembuka rangkaian peringatan HUT Kampung Talisayan sekaligus HUT ke-81 Republik Indonesia.

Kepala Kampung Talisayan, Ali Wardana, mengatakan, Tulak Bala Buang Naas bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi bagian dari identitas budaya masyarakat yang sejak dahulu hidup berdampingan dengan laut.

“Karena masyarakat Talisayan sangat dekat dengan laut, kami berharap seluruh aktivitas masyarakat di pesisir selalu diberikan perlindungan dan keselamatan. Tradisi ini juga menjadi sarana silaturahmi sekaligus identitas daerah,” ujarnya.

S a l a h



satu prosesi yang menjadi bagian penting dalam tradisi tersebut yakni Buang Naas, ditandai dengan penyiraman air linjuang kepada perwakilan anak masyarakat kampung. Air tersebut sebelumnya telah disiapkan dan dibacakan doa.

Prosesi diawali tetua adat, kemudian dilanjutkan Wakil Bupati Berau Gamalis bersama pejabat dan unsur masyarakat yang hadir.

Bagi masyarakat Talisayan, prosesi tersebut mengandung makna spiritual dan sosial.

Doa bersama menjadi ikhtiar untuk memohon keselamatan serta menjauhkan kampung dari berb-

agai marabahaya. Sementara, pelaksanaan secara bersama-sama menjadi ruang untuk memperkuat hubungan antar-masyarakat.

Wakil Bupati Berau, Gamalis, mengapresiasi masyarakat Talisayan yang masih konsisten mempertahankan adat bahari tersebut. Menurutnya, tradisi lokal merupakan warisan yang tidak boleh hilang hanya karena perkembangan zaman.

“Ini bagian dari kebudayaan masyarakat Talisayan yang harus kita jaga. Kita ingin masyarakat terus maju, tetapi tidak kehilangan jati dirinya,” katanya.

Gamalis menilai tantangan pelestarian budaya semakin

besar seiring perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi melalui media sosial.

Karena itu, keterlibatan generasi muda menjadi penting agar pengetahuan mengenai adat tidak berhenti pada generasi saat ini.

Ia mendorong agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut terlibat dalam setiap kegiatan adat. Dengan begitu, tradisi dapat dipahami bukan hanya sebagai ritual tahunan, melainkan sebagai bagian dari identitas dan nilai kehidupan masyarakat.

Selain menjaga budaya, Gamalis melihat tradisi bahari Talisayan memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai bagian dari daya tarik wisata pesisir selatan Berau.

Kekayaan adat dapat berjalan beriringan dengan pengembangan pariwisata tanpa menghilangkan nilai asli yang melekat di dalamnya.

Tradisi Tulak Bala Buang Naas bukan hanya menjadi penanda sebuah perayaan.

Lebih dari itu, ia menjadi pengingat bahwa kemajuan daerah tetap membutuhkan akar budaya yang kuat agar masyarakat Talisayan dapat berkembang tanpa kehilangan warisan yang membentuk jati dirinya. (DINI DIVA APRILIA)

DIREKSI

Komisaris : M. Syaifuddin Zuhrie
Direktur : Rengkuh Enggalingtyaz, Digital
Marketing Manager : Aidil Anugrah, Iklan :
Siti Nur Ariska, Admin : Tariska Ramadayani

Advokat & Konsultan Hukum : Firma Hukum H.A.M & Partner

Email Redaksi : berauterkini2023@gmail.com, Iklan dan informasi : berauterkini2023@gmail.com
Alamat Redaksi : Ruko Komplek Perumahan Berau Indah, Telepon : 0851-6366-0045

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi : Robithoh Johan Palupi,
Koordinator Liputan : Rusdiyono, Editor: Maulana Ilhami Fawdi, Reporter :
Sulaiman, Hendra Irawan, Dini Diva, Adrikni Sholikhati, Grafis : Surya Adji
Permana, Media Sosial : Siti Nur Ariska, IT & Web Development : Fathurrohman.